

Akuntansi Partisipatif dalam Advokasi Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Pinrang

Nurawani^{1*}, Fitriani², Sariana Damis³

¹)Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

²)Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Parepare

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare³

whanynur@gmail.com¹, fitri.fa29@gmail.com², sarianadamis@gmail.com³

* Corresponding Author

Submitted: April 1, 2026

Accepted: May 14, 2026

Published: Aug 28, 2026

ABSTRACT

This study examines the role of participatory accounting in budget advocacy for the interests of women and children in Pinrang Regency, South Sulawesi. The background of the study is the disparity between the demographic proportion of women and children, which reaches 58% of the total population, and the budget allocation of approximately 12% of the regional budget (APBD), despite the local government's increasing commitment to inclusive development. The primary research problem concerns the low civil society participation in gender-responsive budgeting processes and the suboptimal participatory accounting mechanisms bridging the needs of women and children with local fiscal policy. This research aims to analyze the existing condition of participatory accounting practices, identify budget gaps from a gender perspective, and formulate a participatory accounting model that can support gender-responsive budget advocacy through government-community collaboration. The study employs a mixed-methods approach with a concurrent triangulation design, integrating quantitative Gender Budget Analysis (GBA) and qualitative Participatory Action Research (PAR). Data collection was conducted through a baseline survey of 200 respondents, in-depth interviews with 24 key informants, four focus group discussion sessions in two sub-districts, and document analysis of the regional budget (APBD) from 2020 to 2025. Results indicate a consistent upward trend in budget allocation; however, civil society participation capacity still requires strengthening. A pilot project with 20 civil society organizations demonstrated significant improvements: Musrenbang participation increased from 18% to 65%, and budget proposal quality compliant with APBD nomenclature rose from 12% to 60%. This study produces a four-component collaborative participatory accounting model replicable across similar regions in Indonesia.

Keywords: Budget Advocacy; Participatory Accounting; Gender-Responsive Budgeting; Participatory Governance; Women and Children

PENDAHULUAN

Tata kelola keuangan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif gender merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif. Pemerintah daerah dituntut mampu mengalokasikan anggaran secara adil dan tepat sasaran, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Dalam konteks pembangunan daerah, penganggaran responsif gender menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa kebijakan publik mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara setara.

Pemerintah Kabupaten Pinrang menunjukkan komitmen terhadap pembangunan inklusif sebagaimana tercermin dalam RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2021–2026 yang memuat target kesetaraan gender dan perlindungan anak. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang tahun 2023 menunjukkan bahwa perempuan mencapai 51% dari total penduduk, sedangkan anak usia 0–

17 tahun mencapai 32% dari total populasi (BPS Kabupaten Pinrang, 2023). Pada tahun 2023, alokasi anggaran pemberdayaan perempuan mencapai 5,2% dan perlindungan anak sebesar 6,8% dari total APBD Kabupaten Pinrang sebesar Rp1,62 triliun. Namun demikian, alokasi tersebut masih dinilai belum optimal, terutama pada sektor kesehatan reproduksi perempuan, pencegahan kekerasan berbasis gender, dan pendidikan anak usia dini.

Salah satu pendekatan yang dapat memperkuat efektivitas penganggaran responsif gender adalah akuntansi partisipatif. Akuntansi partisipatif menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran publik sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Fung dan Wright (2018) menjelaskan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan efektivitas alokasi anggaran dan memperkuat akuntabilitas publik. Namun, survei awal penelitian menunjukkan bahwa partisipasi organisasi perempuan dan lembaga perlindungan anak dalam forum Musrenbang di Kabupaten Pinrang masih relatif rendah, yaitu masing-masing sebesar 18% dan 22%.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi anggaran responsif gender di Indonesia dan menunjukkan masih banyaknya kendala yang dihadapi. Rahayu dan Setiawan (2021) menemukan bahwa penganggaran responsif gender di pemerintah daerah belum sepenuhnya melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan; partisipasi masih bersifat formalitas tanpa pengaruh nyata terhadap alokasi akhir anggaran. Kusuma dan Rachman (2022) menyatakan bahwa mekanisme Musrenbang masih cenderung administratif dan belum optimal dalam mengakomodasi kebutuhan perempuan dan anak, terutama karena minimnya kapasitas teknis peserta dalam membaca dan menganalisis dokumen anggaran. Sopanah dan Wahyudi (2020) menemukan bahwa rendahnya akses masyarakat terhadap informasi keuangan daerah menjadi hambatan utama dalam mewujudkan penganggaran partisipatif yang bermakna.

Pada lingkup internasional, Wampler, McNulty, dan Touchton (2021) menjelaskan bahwa keberhasilan participatory budgeting di Brasil, India, dan Meksiko sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat sipil dan transparansi informasi anggaran. Budlender dan Hewitt (2019) menegaskan bahwa penganggaran responsif gender yang efektif mensyaratkan integrasi perspektif gender dalam setiap tahapan siklus anggaran, bukan sekadar program tersendiri. Nugroho dan Lestari (2023) menambahkan bahwa keterbatasan kapasitas aparat pemerintah dalam menyusun Gender Budget Statement menyebabkan penganggaran responsif gender belum berjalan optimal di banyak daerah. Meskipun demikian, penelitian yang mengintegrasikan akuntansi partisipatif dengan advokasi anggaran responsif gender pada tingkat pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Pinrang, masih relatif terbatas sehingga terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diisi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kondisi aktual praktik akuntansi partisipatif dalam pengelolaan anggaran daerah di Kabupaten Pinrang; (2) mengidentifikasi gender budget gap pada APBD Kabupaten Pinrang tahun 2020–2025; serta (3) merumuskan model akuntansi partisipatif sebagai rekomendasi penguatan penganggaran responsif gender di pemerintah daerah.

STUDI LITERATUR

Akuntansi Partisipatif: Konsep dan Landasan Teoritis

Akuntansi partisipatif menempatkan warga bukan sekadar sebagai penerima layanan, melainkan sebagai mitra aktif pemerintah dalam siklus pengelolaan keuangan publik. Fung dan Wright (2018) mendefinisikannya sebagai mekanisme empowered participatory governance di mana masyarakat, terutama kelompok yang secara sosial membutuhkan perhatian lebih, diberikan kapasitas dan kesempatan nyata untuk memengaruhi keputusan alokasi sumber daya publik secara konstruktif. Konsep ini berakar pada teori akuntabilitas sosial (social accountability theory) yang menegaskan bahwa kontrol publik atas pengelolaan keuangan negara bukan hanya hak normatif, melainkan mekanisme yang memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan fiskal pemerintah. Teori good governance melengkapi kerangka ini dengan menekankan transparansi, responsivitas, dan partisipasi inklusif sebagai atribut tata kelola yang menjamin efektivitas dan kepercayaan publik terhadap kebijakan daerah (Chambers, 2017).

Wampler, McNulty, dan Touchton (2021) dalam kajian komparatif participatory budgeting di Brasil, India, dan Meksiko menemukan bahwa kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat dalam penganggaran secara konsisten menghasilkan alokasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok yang memerlukan perhatian khusus. Di Brasil, participatory budgeting Porto Alegre berhasil meningkatkan alokasi infrastruktur dasar di kawasan kurang berkembang hingga 40% dalam satu dekade. Keberhasilan ini mensyaratkan tiga prasyarat utama yang perlu dikembangkan bersama: kapasitas kelembagaan masyarakat sipil, komitmen kebijakan pemerintah yang konsisten, dan ketersediaan informasi anggaran yang mudah dipahami publik

Gender Responsive Budgeting dan Advokasi Anggaran

Gender Responsive Budgeting (GRB) merupakan pendekatan analitis yang mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan siklus anggaran. Budlender dan Hewitt (2019) menegaskan bahwa GRB bukan anggaran terpisah untuk perempuan, melainkan proses evaluasi menyeluruh yang membantu pemerintah memastikan kebijakan fiskal memberikan dampak yang adil dan proporsional bagi semua segmen masyarakat. Penelitian di Australia dan Kanada menunjukkan bahwa implementasi GRB yang didukung komitmen pemerintah secara konsisten selama lima tahun menghasilkan peningkatan alokasi anggaran program perempuan dan anak hingga 30%. Di India, mekanisme social audit sebagai bentuk akuntansi partisipatif terbukti efektif dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik (Gaventa & Barrett, 2019).

Di Indonesia, penelitian Antlov, Brinkerhoff, dan Rapp (2020) mencatat bahwa mekanisme Musrenbang yang telah dibangun pemerintah merupakan fondasi partisipasi yang perlu terus dikuatkan. Kajian di berbagai provinsi menunjukkan bahwa partisipasi perempuan masih dapat ditingkatkan secara signifikan apabila kapasitas masyarakat sipil diperkuat dan informasi anggaran disajikan secara lebih aksesibel. United Nations Women (2019) menegaskan bahwa penguatan mekanisme partisipasi yang sudah ada merupakan strategi paling efektif untuk meningkatkan responsivitas anggaran gender dalam kerangka sistem pemerintahan yang telah berjalan. Kabeer (2020) menambahkan bahwa kesetaraan gender dalam alokasi sumber daya publik merupakan prasyarat mendasar bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini memadukan tiga kerangka teoritis yang saling melengkapi. Pertama, Social Accountability Theory (Fung & Wright, 2018) yang menekankan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik sebagai mekanisme yang saling memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan. Kedua, Good Governance Theory yang menempatkan transparansi, partisipasi, responsivitas, dan akuntabilitas sebagai atribut tata kelola yang terus dikembangkan oleh pemerintah daerah yang berorientasi pada pelayanan publik berkualitas (Chambers, 2017). Ketiga, Critical Pedagogy dari Freire (2018) yang menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat harus bersifat dialogis dan transformatif, membangun kapasitas warga untuk menjadi mitra yang setara bagi pemerintah dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Ketiga kerangka ini secara sinergis mendasari pengembangan model akuntansi partisipatif yang diusulkan penelitian ini.

METODE

Desain dan Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain concurrent triangulation mixed-methods, di mana komponen kuantitatif dan kualitatif dilaksanakan secara paralel dan simultan, kemudian diintegrasikan pada tahap interpretasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan berimbang. Paradigma penelitian transformatif (Creswell & Plano Clark, 2018) dipilih sebagai landasan ontologis dan epistemologis, dengan tujuan menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga berkontribusi pada rekomendasi kebijakan konkret bagi penguatan akuntansi partisipatif di Kabupaten Pinrang. Paradigma ini memandu keterlibatan aktif peneliti dalam proses pengembangan solusi bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sejalan dengan prinsip Participatory Action Research (PAR).

Lokasi, Populasi, dan Sampel

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan lokasi penelitian pada Kecamatan Watang Sawitto dan Kecamatan Pinrang. Populasi penelitian meliputi organisasi perempuan, lembaga perlindungan anak, aparat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran daerah. Sampel survei berjumlah 200 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan komposisi: organisasi perempuan 25% (50 responden), lembaga perlindungan anak 25% (50 responden), aparat pemerintah daerah 25% (50 responden), dan tokoh masyarakat 25% (50 responden). Wawancara mendalam dilakukan terhadap 24 informan kunci yang terdiri atas unsur Bappeda, DPRD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, organisasi perempuan, lembaga perlindungan anak, dan forum anak.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui empat teknik yang saling melengkapi. Pertama, analisis dokumen dan data sekunder meliputi kajian terhadap APBD Kabupaten Pinrang tahun 2020–2025, RPJMD 2021–2026, Renstra SKPD terkait, laporan keuangan daerah, serta dokumen kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menggunakan teknik content analysis dan policy mapping (Patton, 2021). Kedua, Gender Budget Analysis (GBA) dilakukan melalui tiga tahapan yaitu gender disaggregated expenditure analysis, gender equality policy assessment, dan gender budget statement analysis. Perhitungan Gender Budget Gap Index (GBGI) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{GBGI} = \text{PAAG} - \text{PPPA}$$

Keterangan:

GBGI = Gender Budget Gap Index

PAAG = Persentase Alokasi Anggaran Gender

PPPA = Persentase Populasi Perempuan dan Anak

Nilai negatif menunjukkan proporsi alokasi anggaran masih lebih rendah dibandingkan proporsi populasi perempuan dan anak.

Ketiga, survei baseline dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur dengan skala Likert 1–5 yang mencakup dimensi pengetahuan, partisipasi, persepsi responsivitas anggaran, dan kendala partisipasi masyarakat. Instrumen survei diuji menggunakan validitas konstruk melalui corrected item-total correlation dengan nilai >0,30 dan reliabilitas Cronbach Alpha sebesar 0,82 yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian reliabel. Keempat, wawancara mendalam semi-terstruktur dan empat sesi focus group discussion (FGD) dilaksanakan di dua kecamatan dengan total 80 peserta dari organisasi masyarakat sipil.

Analisis Data

Analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan pola alokasi anggaran, gender budget gap, dan tren partisipasi. Analisis data kualitatif menggunakan metode coding tematik tiga tahap: open coding menghasilkan 147 kode awal, axial coding mengonsolidasikannya menjadi 18 kategori, dan selective coding mengidentifikasi empat tema inti. Triangulasi dilakukan melalui tiga jalur: sumber, metode, dan peneliti. Keabsahan data dijamin melalui member checking dan prolonged engagement selama enam bulan pengumpulan data. Integrasi data kuantitatif dan kualitatif dilakukan pada tahap interpretasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai partisipasi masyarakat dalam advokasi anggaran responsif gender.

HASIL

Hasil Gender Budget Analysis (GBA): Tren Alokasi Anggaran 2020–2025

Analisis GBA terhadap dokumen APBD Kabupaten Pinrang tahun 2020–2025 menghasilkan gambaran yang positif tentang komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan alokasi anggaran untuk program perempuan dan anak secara berkelanjutan. Analisis ini

menggunakan pendekatan three-pronged gender budget initiative yang mengklasifikasikan pengeluaran ke dalam tiga kategori: (1) gender-specific expenditure, yaitu pengeluaran yang secara eksklusif ditujukan bagi perempuan atau anak; (2) equal opportunity expenditure, yaitu pengeluaran yang memiliki komponen responsif gender; dan (3) general mainstream expenditure, yaitu pengeluaran umum yang secara tidak langsung berdampak pada perempuan dan anak.

Tabel 1. Tren Alokasi Anggaran Program Perempuan dan Anak di Kabupaten Pinrang (2020–2025)

Tahun	Total APBD (Miliar Rp)	Angg. Perempuan (Miliar)	Angg. Anak (Miliar)	% Perempuan	% Anak	Total (%)
2020	1.400	67,2	84,0	4,8%	6,0%	10,8%
2021	1.450	72,5	91,4	5,0%	6,3%	11,3%
2022	1.500	76,5	97,5	5,1%	6,5%	11,6%
2023	1.620	84,2	110,2	5,2%	6,8%	12,0%
2024	1.750	94,5	122,5	5,4%	7,0%	12,4%
2025*	1.820	101,9	131,0	5,6%	7,2%	12,8%

Sumber: APBD Kabupaten Pinrang 2020–2025, diolah melalui Gender Budget Analysis (2025); *Proyeksi

Tabel 1 memperlihatkan bahwa pemerintah Kabupaten Pinrang secara konsisten meningkatkan alokasi anggaran untuk program perempuan dan anak setiap tahunnya. Secara nominal, anggaran perempuan meningkat dari Rp 67,2 miliar (2020) menjadi Rp 94,5 miliar (2024), sementara anggaran anak bertumbuh dari Rp 84,0 miliar menjadi Rp 122,5 miliar dalam periode yang sama. Total APBD meningkat signifikan dari Rp 1,4 triliun (2020) menjadi Rp 1,75 triliun (2024), mencerminkan pertumbuhan kapasitas fiskal daerah yang menggembirakan. Meskipun demikian, porsi persentase anggaran untuk perempuan dan anak terhadap total APBD masih berada di kisaran 12%, sehingga masih terdapat ruang yang dapat dioptimalkan, terutama pada sub-sektor anggaran kesehatan reproduksi perempuan (Rp 2,35 miliar atau 2,8% dari total anggaran kesehatan), program pencegahan kekerasan berbasis gender (Rp 1,23 miliar atau 1,5% dari anggaran sosial), dan program PAUD (Rp 16,4 miliar atau 8,2% dari anggaran pendidikan).

Hasil Analisis Kesenjangan: Gender Budget Gap 2020–2025

Untuk menilai keseimbangan antara proporsi populasi dan respons anggaran pemerintah, penelitian ini menghitung Gender Budget Gap Index (GBGI). GBGI yang mendekati nol menunjukkan keseimbangan ideal antara kebutuhan demografis dan kebijakan fiskal. Tabel 2 menyajikan hasil perhitungan GBGI untuk setiap tahun anggaran.

Tabel 2. Gender Budget Gap Index (GBGI) Kabupaten Pinrang (2020–2025)

Tahun	Proporsi Populasi P & A (%)	Alokasi Anggaran (%)	GBGI (%)	Keterangan
2020	57,0%	10,8%	-46,2%	Perlu penguatan partisipasi
2021	57,5%	11,3%	-46,2%	Perlu penguatan partisipasi
2022	58,0%	11,6%	-46,4%	Perlu penguatan partisipasi

2023	58,0%	12,0%	-46,0%	Tren perbaikan mulai terlihat
2024	58,2%	12,4%	-45,8%	Tren perbaikan positif
2025*	58,5%	12,8%	-45,7%	Tren perbaikan positif

Sumber: BPS Kabupaten Pinrang dan APBD 2020–2025, diolah peneliti (2025); *Proyeksi

Tabel 2 menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pinrang telah memperlihatkan tren perbaikan GBGI yang konsisten, dari -46,2% pada tahun 2020 menuju -45,7% pada proyeksi 2025. Meskipun nilai GBGI masih cukup besar, tren positif ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah yang berkelanjutan dalam meningkatkan alokasi untuk perempuan dan anak setiap tahun anggaran. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa percepatan perbaikan GBGI memerlukan penguatan dari sisi partisipasi masyarakat, sehingga proses perencanaan anggaran dapat semakin diperkaya oleh masukan yang komprehensif dari kelompok perempuan dan anak.

Hasil Survei Baseline: Tingkat Partisipasi dan Pengetahuan Anggaran

Survei baseline terhadap 200 responden menghasilkan gambaran tentang kondisi aktual partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran yang difasilitasi pemerintah daerah. Tabel 3 menyajikan tren tingkat partisipasi dari waktu ke waktu.

Tabel 3. Tren Tingkat Partisipasi dalam Perencanaan Anggaran Daerah (2020–2025)

Tahun	Partisipasi Org. Perempuan (%)	Partisipasi Lembaga Anak (%)	Rata-rata (%)	Kategori
2020	15%	18%	16,5%	Perlu ditingkatkan
2021	16%	19%	17,5%	Perlu ditingkatkan
2022	17%	20%	18,5%	Perlu ditingkatkan
2023	18%	22%	20,0%	Berkembang
2024	20%	24%	22,0%	Berkembang
2025*	22%	26%	24,0%	Berkembang

Sumber: Survei Baseline dan Rekonstruksi Data Retrospektif, 2025; *Proyeksi

Tabel 3 mencatat tren peningkatan partisipasi yang positif dari tahun ke tahun. Partisipasi organisasi perempuan tumbuh dari 15% (2020) menjadi 20% (2024), sementara lembaga perlindungan anak meningkat dari 18% menjadi 24% dalam periode yang sama. Hasil survei juga mengungkapkan bahwa 81% responden menyatakan keinginan kuat untuk lebih berpartisipasi jika diberikan informasi dan pelatihan yang memadai, sementara 68% menyatakan bahwa dokumen anggaran resmi masih perlu disajikan dalam format yang lebih mudah dipahami.

Hasil Wawancara Mendalam: Peluang Penguatan Akuntansi Partisipatif

Analisis tematik terhadap transkrip 24 wawancara mendalam menghasilkan empat tema utama melalui proses tiga tahap (open coding: 147 kode awal; axial coding: 18 kategori; selective coding: 4 tema inti). Tabel 4 menyajikan ringkasan hasil coding tematik.

Tabel 4. Hasil Coding Tematik Wawancara Mendalam: Kondisi dan Peluang Akuntansi Partisipatif

No	Informan	Pernyataan Representatif	Kode	Kategori	Tema
1	Kepala Bidang Bappeda	Pemerintah terus berupaya mendorong partisipasi perempuan, namun kapasitas	KP-01	Kapasitas Peserta	Penguatan Kapasitas

		peserta dalam memahami mekanisme penganggaran perlu ditingkatkan			
2	Ketua Org. Perempuan	Kami aktif mengusulkan program; ke depan perlu panduan agar usulan kami sesuai format anggaran yang ditetapkan	UP-02	Kesesuaian Prosedur	Penguatan Prosedur
3	Kepala Dinas PPA	Kami berkomitmen meningkatkan anggaran perempuan dan anak; sinergi dengan masyarakat sipil akan sangat membantu	KA-03	Sinergi Anggaran	Komitmen Pemerintah
4	Perwakilan Forum Anak	Kami ingin lebih aktif terlibat; perlu mekanisme yang memudahkan suara anak masuk ke perencanaan	KT-04	Mekanisme Keterlibatan	Penguatan Kelembagaan
5	Koordinator NGO	Dokumen APBD perlu disajikan lebih sederhana agar organisasi kami dapat ikut menganalisis	AI-05	Aksesibilitas Informasi	Penguatan Transparansi
6	Anggota DPRD Komisi IV	Kami mendukung pengembangan standar pengawasan anggaran responsif gender	DS-06	Pengembangan Standar	Komitmen Legislatif
7	Kepala Dinas Sosial	Kami ingin forum Musrenbang semakin representatif; perlu strategi agar perempuan lebih aktif dan percaya diri hadir	RF-07	Representasi Forum	Penguatan Partisipasi
8	Ketua Lembaga Anak	Pemerintah terbuka menerima masukan anak; perlu dibangun mekanisme formal yang memastikan suara anak tertampung di APBD	MF-08	Mekanisme Formal	Penguatan Kelembagaan

Sumber: Wawancara Mendalam, Kabupaten Pinrang (2025)

Tabel 4 mengungkap bahwa seluruh informan dari unsur pemerintah maupun masyarakat sipil menunjukkan orientasi yang konstruktif dan kolaboratif. Tema Penguatan Kapasitas disebutkan oleh 19 dari 24 informan, mengindikasikan bahwa peningkatan literasi anggaran masyarakat sipil merupakan kebutuhan mendesak yang disadari bersama. Tema Penguatan Prosedur dan Transparansi diangkat oleh 15 informan, mencerminkan kebutuhan akan format penyampaian informasi anggaran yang lebih aksesibel. Tema Komitmen Pemerintah muncul konsisten dari informan pemerintah daerah dan DPRD, sedangkan Tema Penguatan Kelembagaan dikemukakan oleh 11 informan.

Hasil Focus Group Discussion: Kolaborasi dan Co-Creation Solusi

Empat sesi FGD di dua kecamatan dengan 80 peserta menghasilkan validasi temuan dan perumusan kolaboratif elemen model akuntansi partisipatif. Seluruh peserta FGD mengonfirmasi bahwa pemerintah daerah pada dasarnya telah membuka ruang partisipasi melalui mekanisme Musrenbang, dan yang dibutuhkan adalah penguatan kapasitas masyarakat sipil agar dapat memanfaatkan ruang tersebut secara lebih optimal. Dalam sesi co-creation, peserta bersama perwakilan pemerintah daerah secara kolaboratif merumuskan empat elemen model akuntansi partisipatif: (1) penyederhanaan dan visualisasi informasi anggaran yang mudah dipahami warga lintas latar belakang pendidikan; (2) mekanisme advokasi terstandarisasi sehingga usulan

kelompok perempuan dan anak memiliki jalur formal yang jelas; (3) program pelatihan berkelanjutan yang membangun literasi anggaran sekaligus kepercayaan diri advokasi; dan (4) sistem monitoring partisipatif yang memungkinkan masyarakat sipil memantau realisasi anggaran responsif gender secara transparan.

Hasil Pilot Project: Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Partisipasi

Implementasi terbatas model akuntansi partisipatif di Kecamatan Watang Sawitto dan Kecamatan Pinrang selama tiga bulan menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Tabel 5 menyajikan perbandingan indikator sebelum dan sesudah intervensi pada 20 organisasi masyarakat sipil yang terlibat.

Tabel 5. Perbandingan Indikator Partisipasi Sebelum dan Sesudah Pilot Project

Indikator	Sebelum	Sesudah	Peningkatan
Pemahaman struktur APBD (% peserta)	28%	75%	+47 poin
Kemampuan membaca dokumen anggaran (% peserta)	21%	68%	+47 poin
Kepercayaan diri beradvokasi (skala 1-5)	2,1	3,8	+1,7 poin
Kualitas usulan anggaran (rubrik, skala 1-5)	1,8	3,5	+1,7 poin
Usulan sesuai nomenklatur APBD (%)	12%	60%	+48 poin
Partisipasi dalam Musrenbang kecamatan (%)	18%	65%	+47 poin

Sumber: Monitoring Pilot Project, Kec. Watang Sawitto dan Kec. Pinrang (2025)

Tabel 5 memperlihatkan peningkatan yang sangat positif di seluruh indikator pasca intervensi. Pemahaman peserta tentang struktur APBD meningkat dari 28% menjadi 75% (+47 poin), sementara persentase usulan yang sesuai nomenklatur APBD melonjak dari 12% menjadi 60% (+48 poin), merupakan peningkatan terbesar yang dicapai selama pilot project. Tingkat partisipasi dalam Musrenbang kecamatan meningkat signifikan dari 18% menjadi 65% (+47 poin), menunjukkan bahwa ketika masyarakat sipil diperkuat kapasitasnya, mereka dapat memanfaatkan mekanisme partisipasi yang telah disediakan pemerintah secara jauh lebih optimal.

PEMBAHASAN

Komitmen Pemerintah sebagai Fondasi Penguatan Anggaran Responsif Gender

Temuan GBA menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pinrang telah membangun fondasi yang solid melalui komitmen anggaran yang meningkat secara konsisten selama 2020–2025. Pertumbuhan nominal anggaran perempuan dan anak yang rata-rata mencapai 5–7% per tahun mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya fiskal untuk kepentingan kelompok prioritas ini. Keberadaan RPJMD 2021–2026 yang secara eksplisit memuat target kesetaraan gender dan perlindungan anak merupakan bukti komitmen kebijakan yang tidak dimiliki semua daerah, dan menjadi modal penting bagi percepatan implementasi anggaran responsif gender ke depan. Temuan ini sejalan dengan Budlender dan Hewitt (2019) yang menegaskan bahwa komitmen kebijakan yang tersurat dalam dokumen perencanaan merupakan prasyarat pertama yang harus dipenuhi sebelum instrumen teknis GBA dapat bekerja efektif.

Perbandingan internasional menunjukkan bahwa lintasan yang ditempuh Kabupaten Pinrang adalah lintasan yang benar. Australia dan negara-negara Skandinavia yang kini mencatat GBGI di bawah -15% dan -5% juga memulai implementasi GRB dari kondisi yang jauh dari ideal, dengan modalitas utama berupa komitmen kebijakan yang kemudian diperkuat secara bertahap oleh kapasitas teknis dan keterlibatan masyarakat sipil. Kabupaten Pinrang memiliki keunggulan komparatif berupa adanya jaringan organisasi perempuan dan lembaga perlindungan anak yang aktif, serta dukungan akademisi dan lembaga penelitian, yang apabila dikonsolidasikan melalui

model akuntansi partisipatif yang tepat, berpotensi mempercepat perbaikan GBGI secara signifikan dalam dua hingga tiga siklus anggaran ke depan..

Penguatan Partisipasi sebagai Katalis Peningkatan Responsivitas Anggaran

Tren peningkatan partisipasi yang tergambar dalam Tabel 3, meskipun bertahap, mencerminkan dinamika yang sehat antara pemerintah dan masyarakat sipil. Kenaikan partisipasi organisasi perempuan dari 15% (2020) menjadi 20% (2024) dan lembaga anak dari 18% menjadi 24% menunjukkan bahwa forum-forum yang difasilitasi pemerintah semakin dimanfaatkan oleh masyarakat. Temuan survei bahwa 81% responden ingin lebih aktif berpartisipasi merupakan modal sosial yang sangat berharga; antusiasme ini perlu dijawab dengan program penguatan kapasitas yang sistematis agar energi partisipatif masyarakat dapat diterjemahkan ke dalam kontribusi yang substantif terhadap kualitas anggaran daerah. Hal ini sejalan dengan Wampler et al. (2021) yang menemukan bahwa keberhasilan participatory budgeting tidak hanya bertumpu pada kemauan pemerintah, tetapi juga pada kesiapan masyarakat sipil yang terampil untuk menjadi mitra yang setara.

Program capacity building yang dilaksanakan dalam pilot project terbukti dapat mempercepat kesiapan tersebut; peningkatan persentase usulan yang sesuai nomenklatur APBD dari 12% menjadi 60% dalam tiga bulan menunjukkan bahwa hambatan teknis dapat diatasi relatif cepat dengan intervensi yang tepat sasaran. Temuan FGD yang mengungkap dukungan penuh pemerintah daerah dalam sesi co-creation memberikan keyakinan bahwa model yang dikembangkan akan mendapat landasan kelembagaan yang kokoh untuk implementasi skala penuh.

Model Akuntansi Partisipatif: Jembatan Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat

Model akuntansi partisipatif empat komponen yang dirumuskan penelitian ini dirancang sebagai jembatan kolaboratif yang memperkuat kapasitas kedua pihak—pemerintah dan masyarakat—untuk bersama-sama menghasilkan anggaran yang lebih responsif dan berkeadilan. Gambar 1 di bawah ini menyajikan kerangka model tersebut secara visual.



Gambar 1. Model Akuntansi Partisipatif Empat Komponen untuk Advokasi Anggaran Responsif Gender

Sumber: Dikembangkan dari hasil FGD dan pilot project (2025)

Komponen pertama, Transparansi Anggaran Berbasis Gender, merupakan respons terhadap kebutuhan yang disuarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sipil: penyusunan Citizen Budget tahunan yang mudah dipahami, publikasi Gender Budget Statement oleh setiap SKPD, dan pelaksanaan Gender Budget Forum terbuka setiap semester. Komponen kedua,

Penguatan Kapasitas Berbasis Komunitas, mencakup pelatihan analisis anggaran (20 jam) dan pelatihan advokasi kebijakan (40 jam) yang mengadopsi prinsip critical pedagogy Freire (2018). Komponen ketiga, Mekanisme Advokasi Terstruktur, meliputi prosedur standar Usulan Anggaran Responsif Gender (UARG), pembentukan Gender Budget Working Group (GBWG) multistakeholder, dan mekanisme feedback loop. Komponen keempat, Monitoring dan Evaluasi Partisipatif, mencakup social audit, scorecard partisipasi gender, dan laporan GBGI tahunan yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama menilai kemajuan dan merumuskan langkah perbaikan. Model ini sejalan dengan temuan Gaventa dan Barrett (2019) yang membuktikan bahwa mekanisme social audit terbukti efektif meningkatkan akuntabilitas publik dalam penggunaan anggaran.

Kontribusi Penelitian dan Implikasi Kebijakan

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama. Pertama, bukti empiris tentang tren alokasi anggaran dan GBGI di Kabupaten Pinrang yang dapat menjadi baseline bagi evaluasi kebijakan anggaran responsif gender secara berkala. Kedua, model empat komponen yang telah diuji melalui pilot project dan terbukti meningkatkan kapasitas partisipasi secara signifikan dalam waktu singkat. Ketiga, rekomendasi kebijakan konkret bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan mekanisme akuntansi partisipatif ke dalam siklus penganggaran reguler, sehingga komitmen yang telah tercantum dalam RPJMD dapat terwujud dalam alokasi anggaran yang semakin proporsional dari tahun ke tahun. Secara praktis, model ini dapat diimplementasikan secara bertahap mulai dari dua kecamatan pilot menuju skala kabupaten penuh dalam tiga siklus anggaran. Steccolini, Jones, dan Saliterer (2020) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa ketahanan fiskal pemerintah daerah dibangun melalui mekanisme partisipasi yang terstruktur dan akuntabel.

Keterbatasan penelitian ini perlu dicatat. Pertama, pilot project berlangsung tiga bulan sehingga dampak terhadap alokasi APBD riil belum dapat diukur secara langsung. Kedua, sampel survei 200 responden perlu diperluas untuk mencakup seluruh 12 kecamatan di Kabupaten Pinrang. Ketiga, potensi response bias dalam wawancara tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Penelitian lanjutan disarankan mengukur dampak model ini dalam dua hingga tiga siklus anggaran penuh, serta mengeksplorasi replikasinya di kabupaten lain di Sulawesi Selatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pinrang telah menunjukkan komitmen yang konsisten dalam meningkatkan alokasi anggaran untuk perempuan dan anak, sebagaimana tercermin dari pertumbuhan anggaran nominal yang stabil dari Rp 151,2 miliar (2020) menjadi Rp 217,0 miliar (2024) dan proyeksi Rp 232,9 miliar pada 2025. Menjawab permasalahan pertama, kondisi aktual akuntansi partisipatif di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sipil dalam forum Musrenbang masih berkisar 15–24%, meskipun antusiasme untuk berpartisipasi sangat tinggi (81% responden). Menjawab permasalahan kedua, gender budget gap yang diukur melalui GBGI menunjukkan nilai rata-rata -46% sepanjang 2020–2025, dengan proporsi anggaran perempuan dan anak sekitar 12% sementara mereka mewakili 58% populasi; terdapat ruang optimasi yang signifikan terutama pada sub-sektor kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan berbasis gender, dan PAUD.

Menjawab permasalahan ketiga, penelitian ini berhasil merumuskan dan menguji model akuntansi partisipatif empat komponen yang bersifat kolaboratif: transparansi anggaran berbasis gender, penguatan kapasitas komunitas, mekanisme advokasi terstruktur, dan monitoring evaluasi partisipatif. Pilot project membuktikan efektivitas model ini secara empiris: partisipasi masyarakat sipil dalam Musrenbang meningkat dari 18% menjadi 65% (+47 poin) dan kualitas usulan yang sesuai nomenklatur APBD melonjak dari 12% menjadi 60% (+48 poin) hanya dalam tiga bulan intervensi. Model ini dapat menjadi rekomendasi kebijakan konkret bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang dan daerah-daerah serupa di Indonesia untuk mewujudkan anggaran yang semakin responsif gender dan ramah anak secara berkelanjutan, sejalan dengan target RPJMD dan komitmen pembangunan inklusif yang telah ditetapkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Parepare atas dukungan kelembagaan dan fasilitasi penelitian ini dalam program RisetMu Batch IX. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang khususnya Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, dan Dinas Keuangan atas keterbukaan, komitmen, dan kolaborasi aktif dalam mendukung seluruh tahapan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh 24 informan kunci, 200 responden survei, 80 peserta FGD, serta 20 organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam pilot project atas kontribusi yang sangat berharga.

REFERENSI

- Antlov, H., Brinkerhoff, D. W., & Rapp, E. (2020). Civil society organizations and democratic governance: Frameworks for analysis and action. *Public Administration and Development*, 40(3), 156–169. <https://doi.org/10.1002/pad.1879>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. (2023). *Statistik daerah Kabupaten Pinrang 2023*.
- Budlender, D., & Hewitt, G. (2019). *Gender budgets make more cents: Country studies and good practice*. Commonwealth Secretariat. <https://doi.org/10.14217/9781848590236>
- Chambers, R. (2017). *Can we know better? Reflections for development*. Practical Action Publishing.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang. (2023). *Evaluasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2023*.
- Freire, P. (2018). *Pedagogy of the oppressed: 50th anniversary edition*. Bloomsbury Academic.
- Fung, A., & Wright, E. O. (2018). *Deepening democracy: Institutional innovations in empowered participatory governance*. Verso Books.
- Gaventa, J., & Barrett, G. (2019). Mapping the outcomes of citizen engagement. *World Development*, 40(12), 2399–2410. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.014>
- Kabeer, N. (2020). Gender equality, economic growth, and women's agency: The "endless variety" and "monotonous similarity" of patriarchal constraints. *Feminist Economics*, 22(1), 295–321. <https://doi.org/10.1080/13545701.2015.1090009>
- Kusuma, A. R., & Rachman, T. (2022). Implementasi anggaran responsif gender dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 45–62. <https://doi.org/10.21776/ub.jap.2022.015.02.04>
- Nugroho, R., & Lestari, D. (2023). Kapasitas aparatur daerah dalam penyusunan gender budget statement: Studi empiris di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 88–103.
- Patton, M. Q. (2021). *Qualitative research and evaluation methods: Integrating theory and practice* (5th ed.). SAGE Publications.
- Pemerintah Kabupaten Pinrang. (2023). *Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023*. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.
- Rahayu, S., & Setiawan, D. (2021). Akuntansi partisipatif dan penganggaran responsif gender: Studi pada pemerintah daerah di Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 412–425. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.432>
- Sopannah, A., & Wahyudi, I. (2020). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran daerah: Kendala dan strategi penguatan. *Jurnal Akuntansi Publik*, 3(1), 1–18.
- Steccolini, I., Jones, M., & Saliterer, I. (Eds.). (2020). *Governmental financial resilience: International perspectives on how local governments face austerity*. Emerald Publishing. <https://doi.org/10.1108/S2053-769320200000027>
- UN Women. (2019). *Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2019*.
- Wampler, B., McNulty, S., & Touchton, M. (2021). *Participatory budgeting in global perspective: Analyzing participation and deliberation in Brazil, India, and Mexico*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192893598.001.0001>
- World Bank. (2020). *Accountability in public expenditures in Latin America and the Caribbean*. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8132-6>

Yuningsih, H., & Martini, T. (2021). Analisis anggaran responsif gender dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 23–34.
<https://doi.org/10.31258/jkp.v12i1.5321>